



# Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045

*Sambutan Utama*

**Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S**  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta, 26 Februari 2026



# Lini Masa Transformasi Digital di Indonesia



## Dasar Legal Digitalisasi Elektronik

- Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang **Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government**.
- Pembentukan Kominfo, RITIKNAS, dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai **dasar legal penggunaan elektronik**

## Momentum Percepatan Digitalisasi

- Pandemi COVID-19 sebagai **akselerasi digitalisasi pelayanan publik**
- **Perpres No. 132 Tahun 2022** tentang Arsitektur SPBE
- **Perpres No. 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional
- **Peluncuran Resmi INA Digital**
- **Peningkatan Indeks UN EGDI** dari posisi 107 menuju posisi 64



## Manual dan Memulai Komputerisasi

- Pemerintah Indonesia masih melakukan administrasi secara manual, tapi sudah mulai beralih secara perlahan menuju komputerisasi administrasi

## Strategi Transformasi Digital & Integrasi Data

- **Perpres No. 95 Tahun 2018** tentang **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** sebagai strategi transformasi digital.
- **Perpres No. 39 Tahun 2019** tentang **Satu Data Indonesia** sebagai penyelenggara integrasi dan interoperabilitas data.

## Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045

Mendukung **implementasi dasar hukum terkait Pemerintah Digital** dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam **mengembangkan layanan pemerintah digital yang terintegrasi dan efisien**

# Transformasi Indonesia Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan



Transformasi Sosial

## Menciptakan Manusia Indonesia yang Unggul

Melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya

Kesehatan untuk semua

Pendidikan berkualitas yang merata

Pertindungan sosial yang adaptif

Transformasi Ekonomi

## Membawa Indonesia keluar dari *Middle Income Trap*

Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Penerapan Ekonomi Hijau

Transformasi Digital

Transformasi Tata Kelola

## Menciptakan Layanan Publik Berkualitas dan Inklusif serta Masyarakat Sipil Partisipatif

### Layanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

Kelembagaan dan Proses Bisnis yang efektif dan adaptif

Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas

Manajemen Talenta

Meritokrasi dan Integritas

Manajemen ASN Strategis

Relasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil

### Transformasi layanan pemerintah berbasis digital

Akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai

Percepatan penerapan Satu Data Indonesia

Percepatan pembangunan pusat data nasional

Peningkatan Keamanan Siber

### Percepatan kesiapan digital

Talenta digital ASN

Percepatan pembentukan regulasi adaptif

Literasi digital masyarakat

Pembentukan Lembaga Publik Pelaksana Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

Landasan Transformasi

Kerangka Implementasi Transformasi

Amanat UU No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2045 serta Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029 bahwa:

1

Transformasi digital sebagai *enabler* utama pembangunan untuk mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju Visi Indonesia 2045.

2

Salah satu pilar Transformasi Digital adalah Pemerintah Digital yang *data-driven* dan *user centric* guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperkuat tata kelola, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

3

Digitalisasi yang inklusif dan berkeadilan (*no one left behind*) dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kelompok rentan, serta perluasan akses layanan publik.



RPJMN 2025-2029



Pemerintah Digital

Program Prioritas Nasional 7 – Kegiatan Prioritas Utama #78  
“Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas”

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

# Tantangan Pemerintah Digital



01



**Kelemahan  
Pemahaman atas  
Kebutuhan  
Pengguna**

02



**Tantangan Tata  
Kelola dan  
Orkestrasi  
Keterpaduan**

03



**Tantangan  
Fragmentasi  
Ekosistem  
Layanan, Data,  
Teknologi, dan  
Keamanan Digital**

04



**Tantangan  
Kelembagaan  
dan Sumber Daya  
Manusia**

05



**Tantangan  
Perkembangan  
Digital Indonesia  
di Tengah  
Perkembangan  
Global**

# Visi Terwujudnya Pemerintah Digital untuk Mendukung Visi Indonesia 2045



## Misi 1

Mewujudkan transformasi layanan pemerintah berbasis digital yang bermanfaat dan berdampak optimal bagi pengguna serta mendukung pencapaian program pembangunan nasional yang efektif dan tepat sasaran

## Misi 2

Mewujudkan ekosistem Pemerintah Digital sebagai bagian dari transformasi tata kelola yang mendorong transformasi sosial dan transformasi ekonomi

## Sasaran

1. Kebijakan dan tata kelola Pemerintah Digital yang adaptif, efektif, dan mendorong inovasi

2. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Pemerintah yang Kompeten, Lincah, dan Berbudaya Digital

3. Data yang Berkualitas, Akurat, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, dan Dapat Dipertukarkan

4. Teknologi Pemerintah Digital yang Andal, Mutakhir, Adaptif, dan Dinamis

5. Keamanan Pemerintah Digital yang tangguh, terpercaya, dan berkesinambungan

6. Layanan Digital Pemerintah Yang Terpadu, Inklusif, Mudah Diakses dan Berorientasi Pengguna

## Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

### Kebijakan dan Tata Kelola

- 1.1 Mendorong sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah digital
- 1.2 Mendorong inovasi pendanaan dan transformasi kebijakan pengadaan barang dan jasa digital yang lincah, adaptif, dan kontekstual
- 1.3 Mendorong riset, inovasi, dan kolaborasi untuk memperkuat kebijakan dan penerapan pemerintah digital

### Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

- 2.1 Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia aparatur
- 2.2 Memperkuat budaya digital di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- 2.3 Memperkuat kelembagaan yang mampu mengoptimalkan orkestrasi dan implementasi Pemerintah Digital

### Data

- 3.1 Menguatkan kebijakan dan tata kelola keterpaduan data
- 3.2 Menata kewenangan dan penentuan walidata, menetapkan referensi data, serta memfasilitasi pertukaran data
- 3.3 Mengoptimalkan pemanfaatan data untuk penyusunan kebijakan dan penyempurnaan Layanan Digital Pemerintah

### Teknologi

- 4.1 Mendorong pengembangan Teknologi Pemerintah Digital dengan kapabilitas untuk mendukung keterpaduan dan pemutakhiran teknologi
- 4.2 Mendorong penyediaan Infrastruktur Pemerintah Digital berbagi pakai
- 4.3 Mengembangkan Infrastruktur Publik Digital dan teknologi terkait untuk memfasilitasi keterpaduan

### Keamanan

- 5.1 Memperkuat tata kelola dan manajemen keamanan Pemerintah Digital
- 5.2 Membangun kapabilitas dan budaya keamanan siber serta mengarusutamakan keamanan siber dalam penerapan Pemerintah Digital

### Layanan

- 6.1 Melakukan harmonisasi dan pengelolaan prioritas Layanan Digital Pemerintah
- 6.2 Mendorong kemudahan Layanan Digital Pemerintah melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan standar Layanan Digital Pemerintah
- 6.3 Mengembangkan dan mengelola Portal Layanan Digital Pemerintah secara terpadu

Tahap I: 2025 – 2029  
Penguatan Transformasi

Tahap II: 2030 – 2034  
Akselerasi Transformasi

Tahap III: 2035 – 2039  
Ekspansi Global

Tahap IV: 2040 – 2045  
Perwujudan Indonesia Emas 5



# Satu Data Indonesia

## Tata Kelola Data

Menemukan dan Menjaga Kualitas Data



Mencari Sumber Data



Menentukan Standar & Kualitas



Mengatur Aturan & Proses



Mengolah Data

Data Flow



Mendistribusikan Data

Data Berkualitas



Layanan Berdampak



Manfaat bagi Masyarakat

# Orkestrasi Lintas Kementerian/Lembaga Dalam Pemerintah Digital



Memperkuat kelembagaan Pemerintah Digital menjadi prasyarat untuk **memastikan koordinasi dan implementasi berjalan optimal di seluruh tingkat pemerintahan**

Penguatan ini mencakup penguatan **mandat, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta kapasitas institusi** dalam memantau dan mengarahkan penerapan Pemerintah Digital.

Tata Kelola dan Penyelenggara Pemerintah Digital





Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi, partisipasi, dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045 ini.

Ke depan, bersama kita perkuat komitmen dan sinergi untuk implementasi Rencana Induk Pemerintah Digital yang nyata dan berdampak.



# Terima Kasih

Jakarta, 26 Februari 2026

